



RESEARCH ARTICLE

Islam Modernis Dan Gerakan Pembaharuan Politik Organisasi Muhammadiyah

Received:
Accepted:

Annisa Nurul Mubarakah¹, Muhammad Fikri Misbahul Anam², Aji Prasetiya Nugraha³, Willy Gunawan⁴, E Mulya Syamsul⁵

***Corresponding author**

Annisa Nurul
Mubarakah, Universitas Majalengka
E-mail:
annisanurulumubarakah@gmail.com

Abstract: This study explores the political reform movement of Muhammadiyah within the broader context of modern Islamic thought and its role in shaping Indonesia's democratic development. As one of the most prominent modernist Islamic organizations in Southeast Asia, Muhammadiyah embodies a vision of Islam that integrates religious values with rationality, social ethics, and progressive action. Through a descriptive qualitative method and literature review, the research examines how Muhammadiyah's engagement in politics—though non-partisan—represents a transformative form of *tajdid* (renewal), aimed at fostering justice, moral integrity, and inclusive governance. Muhammadiyah's political stance is deeply influenced by its modernist interpretation of Islam, which emphasizes education, civil society development, and ethical public leadership. Findings show that Muhammadiyah functions as both a moral compass and a civic actor, advocating for political reform that aligns with Islamic principles and democratic ideals. The study highlights Muhammadiyah's unique position in bridging traditional Islamic values with the demands of modern political life in Indonesia.

Keywords: Muhammadiyah, political reform, modern Islam

Abstrak: Penelitian ini mengkaji gerakan pembaharuan politik Muhammadiyah dalam konteks pemikiran Islam modern dan kontribusinya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu organisasi Islam modernis terbesar di Asia Tenggara, Muhammadiyah merepresentasikan visi Islam yang memadukan nilai-nilai keagamaan dengan rasionalitas, etika sosial, dan aksi progresif. Melalui metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, penelitian ini menelusuri bagaimana keterlibatan Muhammadiyah dalam ranah politik—meskipun bersifat non-partisan—merupakan bentuk *tajdid* (pembaruan) yang transformatif dalam mendorong keadilan, integritas moral, dan pemerintahan yang inklusif. Sikap politik Muhammadiyah dipengaruhi oleh interpretasi modern terhadap Islam yang menekankan pentingnya pendidikan, penguatan masyarakat sipil, dan kepemimpinan publik yang beretika. Temuan menunjukkan bahwa Muhammadiyah berperan ganda sebagai penuntun moral dan aktor sipil yang aktif mengadvokasi reformasi politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan cita-cita demokrasi. Penelitian ini menegaskan posisi unik Muhammadiyah dalam menjembatani nilai-nilai tradisi Islam dengan tuntutan kehidupan politik modern di Indonesia.

Kata kunci: Muhammadiyah, pembaharuan politik, Islam modern.

About Author

Annisa Nurul Mubarakah, Fakultas Agama Islam, Universitas Majalengka, Indonesia, Muhammad Fikri Misbahul Anam, Fakultas Agama Islam, Universitas Majalengka, Indonesia, Aji Prasetya Nugraha, Fakultas Agama Islam, universitas Majalengka, Indonesia, Willy Gunawan, Fakultas Agama Islam, Universitas Majalengka, Indonesia, Mulya Syamsul, Fakultas Agama Islam, Universitas Majalengka, Indonesia.

To cite this article: Regina, Aab, Enur, Firly, & Raffi. (2025). The Worldview Of Islam: Islamisasi Ilmu Pengetahuan Sebagai Upaya Membentuk Insan Kamil di Lingkungan Pendidikan . *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11(1), 18–25. <https://doi.org/10.31949/al-akhbar.v11i1.14407>

1. Introduction

Kemajuan umat Islam di Indonesia tidak lepas dari peran para tokoh dan berbagai organisasi keislaman yang secara aktif terlibat dalam kegiatan amal usaha di berbagai bidang, seperti agama, pendidikan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Melalui kontribusi mereka, umat Islam terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, memperluas akses pendidikan, maupun memperkuat solidaritas sosial di tengah Masyarakat (Marsudi & Zayadi, 2021). Kemiskinan dan keterbelakangan yang melilit kehidupan masyarakat pada umumnya kerap dianggap sebagai akibat langsung dari sistem masyarakat kolonial yang eksploitatif serta penguasa feodal yang opresif. Kedua kekuatan ini berperan besar dalam menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana sumber daya alam maupun tenaga kerja dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam tekanan dan kekurangan. Struktur kekuasaan yang menindas dan tidak memberi ruang bagi kemajuan rakyat jelata menjadi hambatan utama dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan (Marsudi & Zayadi, 2021).

Masalah masyarakat yang kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan, menjadi latar bagi munculnya berbagai gerakan sosial keagamaan di berbagai wilayah Indonesia. Gerakan-gerakan ini lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial yang menekan, sekaligus sebagai upaya untuk membawa perubahan melalui nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks ini, akan menjadi penengah dalam kondisi yang melatarbelakangi lahirnya beberapa gerakan sosial Islam, jenis-jenis amal usaha yang mereka lakukan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta bagaimana peran kaum modernis turut mendorong terjadinya transformasi sosial di negeri ini melalui pendekatan rasional dan pembaruan pemikiran keislaman. Peneliti akan membahas tentang gerakan pembaharuan politik Islam di Indonesia, karena topik ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam muncul berdasarkan dorongan keadaan yang hadir dan mengelilingi dunia Islam di Indonesia pada awal abad ke 20, yaitu keadaan sosial politik, budaya dan keagamaan Adapun Muhammadiyah tidak pernah menyatakan nonkooperasi atau kooperasi dengan pemerintah Hindia Belanda dalam melakukan perjuangan kemerdekaan Indonesia (Jayusman & Shavab, 2021). Pada awal didirikannya, Muhammadiyah memang sempat terlibat dalam kegiatan politik, namun yang menarik adalah organisasi ini tetap memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk berkiprah di ranah politik secara individu. Hal ini tercermin dari sosok pendirinya, K.H. Ahmad Dahlan, yang pernah aktif dalam organisasi Jamiatul Khair, sebuah lembaga

pendidikan dan sosial yang juga memiliki nuansa politik pada masanya (Jayusman & Shavab, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika politik organisasi Islam di Indonesia, khususnya sejak abad ke-20 hingga era modern. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana peran dan kontribusi organisasi-organisasi Islam, terutama Muhammadiyah. Dalam perkembangan politik di Indonesia serta bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar keislaman. Meskipun telah banyak referensi yang membahas mengenai politik Muhammadiyah di Indonesia, peneliti ingin memberikan pembaruan melalui sudut pandang yang lebih relevan dengan kondisi sosial-politik saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana Muhammadiyah beradaptasi dan mengambil peran dalam dinamika politik Indonesia modern, tanpa mengesampingkan identitasnya sebagai organisasi dakwah dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Muhammadiyah pada abad 20an, memiliki visi untuk menegakkan amar maruf nahi munkar; hubungan yang benar terhadap sesama manusia dan memastikan bahwa Islam (dan Muhammadiyah) membawa rahmatan lil 'alamin; kedamaian terhadap semesta. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa afiliasi politik adalah urusan pribadi atau privat. Meskipun tidak terlibat langsung dalam partai politik, Muhammadiyah aktif mendorong nilai-nilai keadilan, etika politik, dan keterlibatan umat Islam dalam kehidupan bernegara. Pada masa pergerakan kemerdekaan, banyak tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam perjuangan nasional, baik secara individu maupun melalui organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Masyumi. Sikap politik Muhammadiyah pada abad ke-20 ditandai oleh prinsip independensi, netralitas aktif, dan peran sebagai kekuatan moral. Organisasi ini lebih memilih memberikan kontribusi dalam membentuk masyarakat madani melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan, serta menjadi penyeimbang dalam dinamika politik nasional (Tirtana et al., 2022).

2. Literature review

Muhammadiyah, sebagai salah satu gerakan Islam yang berpengaruh di Indonesia, lahir di tengah gejolak sosial dan politik pada awal abad ke-20. Saat itu, masyarakat Indonesia sedang berada dalam tekanan penjajahan kolonial Belanda yang memicu ketimpangan sosial, keterbelakangan pendidikan, dan lemahnya pemahaman keagamaan. Kehadiran Muhammadiyah menjadi respons terhadap kondisi tersebut, dengan menawarkan pembaharuan dalam praktik keislaman yang lebih rasional, modern, dan relevan dengan tantangan zaman (Almafariju, 2024). Konteks historis kelahiran Muhammadiyah sangat penting untuk dipahami agar dapat mengapresiasi peran dan kontribusinya dalam membangun bangsa. Faktor internal seperti keprihatinan KH. Ahmad Dahlan terhadap praktik keagamaan yang cenderung stagnan, serta faktor eksternal seperti pengaruh pembaharuan Islam di Timur Tengah, menjadi pemicu lahirnya gerakan ini. Muhammadiyah hadir tidak hanya sebagai organisasi dakwah, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang mendorong kemajuan pendidikan, kesehatan, dan pemikiran Islam modern di Indonesia.

Islam modern adalah bentuk pemikiran dan praktik keislaman yang berusaha menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan tantangan kehidupan kontemporer. Gerakan Islam modern muncul sebagai respons terhadap kemunduran umat Islam dan pengaruh kolonialisme pada abad ke-19 dan 20, dengan tujuan menghidupkan kembali semangat keislaman yang rasional, progresif, dan relevan dengan realitas sosial. Ciri utama Islam modern adalah penekanan pada ijtihad (pemikiran kritis), pembaruan (tajdid), serta keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam modern tidak meninggalkan ajaran pokok agama, tetapi mencoba menafsirkan ulang teks-teks keagamaan agar sesuai dengan konteks zaman. Tokoh-tokoh

seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan di Indonesia seperti KH. Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, dikenal sebagai pelopor pemikiran Islam modern. Di Indonesia, Islam modern sering diidentikkan dengan gerakan pembaruan seperti Muhammadiyah, yang mengedepankan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari dakwah. Islam modern mendorong umat untuk menjadi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tanpa mengesampingkan nilai-nilai spiritual, akhlak, dan keadilan (Tomadehe et al., 2023).

Muhammadiyah lahir bukan sebagai organisasi politik atau partai, melainkan sebagai “gerakan politik” dalam arti yang lebih luas, yaitu gerakan yang membawa visi perubahan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Selain sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, Muhammadiyah juga menunjukkan karakter politik melalui langkah-langkah awal yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan. Hal ini terlihat dari keterlibatannya dalam berbagai relasi sosial-politik dan upayanya membangun jaringan dengan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh pergerakan dan organisasi lain. Dengan demikian, sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah mengusung semangat perubahan yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menyentuh ranah politik secara substansial, meskipun tetap menjaga jarak dari politik praktis. Muhammadiyah sendiri dalam berpolitik bergerak kepada arah kemanusiaan, fokus pada

Masalah sosial, serta tidak menyetujui hadirnya penyimpangan yang ditimbulkan oleh penguasa yang berlaku. Muhammadiyah memberikan dukungan kepada kekuasaan yang memperhatikan dengan serius terhadap permasalahan keadilan, perbaikan ekonomi-sosial masyarakat dan perbaikan praktik KKN. Muhammadiyah dalam gerakan moralnya memiliki kepentingan agar pemerintahan yang berjalan tetap berjalan lurus dalam ranahnya. Memiliki orientasi atau tujuan kepada masyarakat serta berupaya untuk tidak merugikan negara. Muhammadiyah dapat mengambil sikap responsive dan kritisnya sebagai interest group ketika kekuasaan atau pemerintahan jauh dari adanya prinsip keadilan serta tidak benar atau tidak serius dalam upaya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi Masyarakat (Hawari et al., 2023).

Muhammadiyah pada abad ke-20an, memiliki visi untuk menegakkan amar maruf nahi munkar; hubungan yang benar terhadap sesama manusia dan memastikan bahwa Islam (dan Muhammadiyah) membawa rahmatan lil ‘alamin; kedamaian terhadap semesta. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa afiliasi politik adalah urusan pribadi atau privat. Meskipun tidak terlibat langsung dalam partai politik, Muhammadiyah aktif mendorong nilai-nilai keadilan, etika politik, dan keterlibatan umat Islam dalam kehidupan bernegara. Pada masa pergerakan kemerdekaan, banyak tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam perjuangan nasional, baik secara individu maupun melalui organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Masyumi. Sikap politik Muhammadiyah pada abad ke-20 ditandai oleh prinsip independensi, netralitas aktif, dan peran sebagai kekuatan moral. Organisasi ini lebih memilih memberikan kontribusi dalam membentuk masyarakat madani melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan, serta menjadi penyeimbang dalam dinamika politik nasional (Tirtana et al., 2022).

3. Method

Politik Muhammadiyah penting bagi mahasiswa karena memberikan contoh bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa secara intelektual, moderat, dan beretika. Sebagai generasi muda dan agen perubahan, mahasiswa perlu memahami bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat—nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Muhammadiyah. Selain itu, pemahaman terhadap politik Muhammadiyah dapat membuka wawasan mahasiswa tentang bagaimana organisasi Islam dapat berperan aktif dalam

membangun bangsa tanpa harus terlibat langsung dalam politik praktis. Ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara kritis dan konstruktif dalam kehidupan demokrasi, dengan tetap menjaga idealisme dan nilai keislaman. Muhammadiyah juga mampu menyuarakan aspirasi rakyat, mendorong kebijakan publik yang adil, serta menjadi pengawas moral bagi pemerintah. Dengan demikian, politik Muhammadiyah memberi dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian literatur review, gerakan pembaharuan politik organisasi Muhammadiyah pada abad ke-20 mencerminkan komitmen organisasi ini terhadap modernisasi Islam di Indonesia. Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan dan pendidikan, tetapi juga aktif dalam dinamika sosial-politik bangsa. Muhammadiyah memiliki peran sentral dalam membangun budaya politik Indonesia, baik di tingkat regional maupun nasional. Mereka mempengaruhi dinamika politik dan banyak berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan politik di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo berkontribusi dalam perumusan dasar negara dan penguatan nilai-nilai Islam dalam konteks keindonesiaan.

Meskipun Muhammadiyah tidak mendirikan partai politik, para anggotanya banyak yang terlibat dalam kegiatan politik melalui partai-partai yang sejalan dengan semangat pembaharuan dan keislaman. Memasuki era Orde Baru, Muhammadiyah tetap mempertahankan sikap independensinya, meskipun menghadapi tekanan dari rezim yang cenderung otoriter. Di bawah kepemimpinan Amien Rais, Muhammadiyah menegaskan kembali pentingnya peran civil society dalam mengontrol kekuasaan negara. Amien Rais, yang juga mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, namun tetap berpartisipasi dalam proses politik dengan memberikan dukungan berdasarkan nilai-nilai Islam (Ahmad & Hasan, 2024). Pada masa Reformasi, Muhammadiyah berperan aktif dalam mendorong demokratisasi, transparansi, dan penegakan hak asasi manusia. Meskipun demikian, organisasi ini tetap menjaga jarak dari politik praktis dan lebih fokus pada peran moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peneliti mencari referensi dari berbagai sumber, mulai dari penelitian terdahulu hingga kajian-kajian modern, untuk memahami pembaharuan politik Islam yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah. Proses penelusuran ini dilakukan secara mendalam guna melihat perkembangan pemikiran dan peran Muhammadiyah dalam konteks sosial-politik di Indonesia, khususnya dalam hal pembaharuan yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari upaya ini adalah agar masyarakat dan mahasiswa dapat mengetahui bentuk serta perkembangan pembaharuan tersebut secara komprehensif. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pembaharuan politik Islam Muhammadiyah dapat dijadikan inspirasi untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat di lingkungan masing-masing, serta menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkemajuan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat.

4. Result

Hasil dari penelitian literatur review dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam isu-isu politik merupakan bentuk respons organisasi terhadap dinamika sosial dan kebutuhan umat di berbagai konteks. Dari berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat maupun lingkungan sekitarnya, terlihat bahwa Muhammadiyah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan realitas politik nasional. Meskipun secara kelembagaan

Muhammadiyah menegaskan sikap non-partisan, namun dalam praktiknya organisasi ini tetap memberikan kontribusi besar dalam wacana dan tindakan politik melalui kader-kadernya serta pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Temuan-temuan dalam literatur menunjukkan bahwa peran politik Muhammadiyah lebih diarahkan pada penguatan nilai-nilai etika, moral, dan keadaban publik, tanpa harus terlibat langsung dalam kekuasaan politik praktis.

Munculnya isu atau fenomena politik Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari internal organisasi maupun eksternal lingkungan sosial-politik Indonesia. Pertama, faktor ideologis dan teologis menjadi dasar utama, di mana Muhammadiyah sejak awal berdiri berlandaskan pada semangat *tajdid* (pembaharuan) dalam Islam. Hal ini mendorong Muhammadiyah untuk tidak hanya fokus pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga terlibat dalam kehidupan sosial dan politik sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kedua, faktor historis turut berpengaruh, terutama pengalaman para tokoh Muhammadiyah di masa kemerdekaan dan reformasi yang secara aktif berkontribusi dalam pembentukan identitas nasional dan demokratisasi. Ketiga, faktor kepemimpinan juga menjadi pemicu penting, di mana figur-figur seperti Amien Rais, Syafii Maarif, dan Haedar Nashir memainkan peran besar dalam membentuk arah dan posisi politik Muhammadiyah secara moral maupun praktis.

Selanjutnya, faktor perubahan sosial-politik nasional seperti dinamika demokrasi, pemilu, isu keadilan sosial, hingga radikalisme agama, juga ikut membentuk respon-respon politik Muhammadiyah. Dalam banyak kasus, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan resmi atau fatwa sosial sebagai bentuk tanggapan terhadap isu-isu kebangsaan. Selain itu, faktor eksternal berupa tekanan atau ekspektasi publik terhadap peran moral ormas Islam besar seperti Muhammadiyah, membuat organisasi ini tidak bisa bersikap apatis terhadap politik. Masyarakat dan media sering kali menyoroti sikap Muhammadiyah, terutama dalam situasi politik nasional yang memanas, sehingga organisasi ini berada dalam posisi strategis namun dilematis — antara mempertahankan independensi dan memenuhi harapan umat. Terakhir, peran kader-kader Muhammadiyah dalam partai politik seperti PAN dan di pemerintahan juga berkontribusi dalam membentuk persepsi publik terhadap keterlibatan politik Muhammadiyah, walaupun secara kelembagaan tetap menegaskan tidak berafiliasi secara formal.

Implikasi dari isu atau fenomena politik Muhammadiyah jika dikaji secara transformatif dan dikaitkan dengan semangat 2 (*tajdid*) menunjukkan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam ranah politik bukan sekadar respons pasif terhadap kondisi sosial-politik, melainkan bagian dari upaya aktif untuk mereformasi tata kehidupan bangsa menuju arah yang lebih adil, beradab, dan bermartabat. Dalam perspektif *tajdid*, Muhammadiyah tidak hanya berusaha menyuarakan kepentingan umat, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai keislaman yang progresif dalam struktur sosial dan politik Indonesia. Keterlibatan ini berdampak pada penguatan etika politik berbasis moralitas Islam, yang menolak praktik-praktik politik transaksional dan pragmatis. Di satu sisi, fenomena ini mendorong transformasi internal Muhammadiyah agar terus adaptif terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan jati diri keagamaannya. Di sisi lain, secara eksternal, Muhammadiyah berkontribusi dalam menciptakan kultur politik yang sehat, inklusif, dan solutif, melalui penguatan civil society serta advokasi terhadap isu-isu publik, seperti pendidikan, kemiskinan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, gerakan politik Muhammadiyah, meskipun tidak partisan, merupakan bentuk nyata dari pembaharuan sosial-politik yang bertujuan membangun masyarakat utama (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*) dalam kerangka Islam berkemajuan.

5. Discussion

Berdasarkan hasil kajian literatur dengan metode kualitatif deskriptif, dapat disimpulkan bahwa gerakan politik Muhammadiyah pada abad ke-20 hingga saat ini merupakan wujud dari dinamika pembaharuan (*tajdid*) dalam merespons perubahan sosial-politik di Indonesia. Meskipun secara kelembagaan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, Muhammadiyah tetap memainkan peran strategis dalam ranah politik sebagai kekuatan moral yang menekankan nilai etika, keadilan sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan kebangsaan. Fenomena keterlibatan politik ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti ideologi keislaman, sejarah kebangsaan, kepemimpinan, perubahan sosial nasional, dan ekspektasi publik terhadap ormas Islam. Implikasinya, secara transformatif, Muhammadiyah tidak hanya menjadi penjaga moral bangsa, tetapi juga agen perubahan yang mendorong terciptanya sistem politik yang lebih beradab, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan mengusung prinsip Islam berkemajuan, gerakan politik Muhammadiyah menegaskan bahwa pembaharuan bukan sekadar perubahan simbolik, tetapi langkah nyata untuk menghadirkan keadilan dan kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Bachtiar, 2022).

Keterlibatan politik Muhammadiyah bukanlah fenomena yang muncul secara instan, melainkan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor historis, ideologis, dan sosial. Sebagai gerakan Islam modernis, Muhammadiyah berkomitmen pada pembaharuan yang mendorong keterlibatan aktif dalam menjawab persoalan kebangsaan. Kebutuhan umat terhadap representasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik menjadi alasan utama Muhammadiyah bersikap terhadap isu-isu politik. Perubahan iklim politik nasional pasca-Reformasi turut membuka ruang lebih besar bagi ormas untuk memainkan peran strategis dalam demokrasi. Keterlibatan ini tidak bertujuan merebut kekuasaan, tetapi untuk menegakkan etika politik dan memberi kontribusi nyata bagi kemaslahatan umat. Dalam pandangan Muhammadiyah, politik adalah bagian dari dakwah sosial untuk mewujudkan keadilan dan keberadaban dalam kehidupan berbangsa.

Gerakan pembaharuan politik Muhammadiyah membawa berbagai dampak yang terasa secara internal maupun eksternal. Di dalam organisasi, pembaharuan ini memperkuat identitas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang menjunjung nilai-nilai Islam berkemajuan. Keterlibatan politik mendorong kader untuk lebih peka terhadap persoalan sosial dan aktif dalam membangun budaya politik yang etis dan berkeadaban (Marsudi & Zayadi, 2021). Secara eksternal, masyarakat semakin memandang Muhammadiyah sebagai kekuatan moral dalam demokrasi. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan, seperti potensi salah paham publik ketika kader Muhammadiyah terlibat dalam partai politik. Selain itu, gerakan ini membuka ruang dialog antara agama dan negara yang lebih terbuka, di mana Muhammadiyah aktif mengadvokasi isu-isu penting seperti pendidikan, keadilan sosial, dan antikorupsi. Dengan demikian, pembaharuan politik Muhammadiyah berdampak positif dalam membangun kesadaran politik umat, tetapi juga menuntut kehati-hatian agar tetap konsisten sebagai gerakan dakwah yang independent (Marsudi & Zayadi, 2021).

Penelitian terdahulu cenderung menekankan aspek historis dan peran tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam konstelasi politik nasional. Mereka menyoroti kontribusi Buya Hamka dalam gerakan pembaharuan Muhammadiyah pada periode 1925–1966. Penelitian ini lebih fokus pada dimensi sejarah dan figur sentral dalam organisasi. Sementara itu, penelitian terkini lebih menyoroti dinamika kontemporer Muhammadiyah dalam konteks politik Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Muhammadiyah beradaptasi dengan tantangan zaman dan peranannya dalam perubahan sosial-politik di Indonesia. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada fokus temporal dan pendekatan analitis: penelitian terdahulu lebih menekankan pada sejarah dan peran individu, sementara penelitian terkini

lebih menyoroti dinamika kontemporer dan peran kolektif organisasi dalam perubahan sosial-politik (Aziz & Zakir, 2022).

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, pentingnya memahami gerakan pembaharuan politik Muhammadiyah terletak pada kontribusinya dalam membangun fondasi politik yang berlandaskan pada nilai-nilai moral, etika Islam, dan prinsip keadilan sosial. Muhammadiyah tidak hanya fokus pada dakwah keagamaan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menciptakan kesadaran politik umat melalui pendidikan, advokasi kebangsaan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pendekatan politik nilai, Muhammadiyah menjadi kekuatan moral yang mampu menyeimbangkan antara idealisme keislaman dan realitas kebangsaan, serta menjadi contoh bagi model partisipasi politik yang bersih dan beradab di tengah dinamika politik.

6. Conclusion

Gerakan pembaharuan politik Muhammadiyah merupakan bentuk nyata dari tajdid atau pembaruan yang secara konsisten merespons dinamika sosial dan politik Indonesia sejak abad ke-20. Meskipun secara kelembagaan Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik tertentu, perannya dalam membentuk kesadaran politik umat sangat signifikan. Melalui pendidikan, advokasi sosial, dan nilai dakwah yang progresif, Muhammadiyah menunjukkan bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, melainkan ruang untuk menegakkan keadilan, etika publik, dan kemaslahatan umat secara luas. Fenomena keterlibatan Muhammadiyah dalam ranah politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti ideologi Islam berkemajuan, sejarah kebangsaan, serta respons terhadap tuntutan sosial dan perubahan politik nasional, terutama pasca-Reformasi. Di sisi lain, keterlibatan ini juga melahirkan tantangan, seperti munculnya stigma ketika kader Muhammadiyah terjun ke dunia politik praktis, sehingga diperlukan sikap kehati-hatian agar organisasi tetap berada pada jalur dakwah independen.

Namun, keterlibatan Muhammadiyah dalam ranah politik juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama dalam menjaga jarak dari kepentingan politik praktis yang dapat mencederai netralitas organisasi. Kehadiran kader-kader Muhammadiyah di kancah politik kerap menimbulkan dilema antara identitas keorganisasian dan peran individu. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menegaskan posisi politik nilai, yaitu dengan memandang politik sebagai sarana menegakkan keadilan, etika, dan kemaslahatan umat, bukan semata perebutan kekuasaan. Pendekatan ini memungkinkan Muhammadiyah untuk terus relevan sebagai gerakan sosial keagamaan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjaga integritasnya sebagai kekuatan pembaruan yang konsisten dalam mengawal arah politik nasional yang beradab dan keislaman.

Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek historis dan figur sentral seperti Buya Hamka dalam dinamika politik Muhammadiyah, sementara penelitian terbaru menunjukkan adanya pergeseran fokus ke arah peran kolektif organisasi dalam merespons tantangan kontemporer. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya merepresentasikan warisan sejarah, tetapi juga menjadi aktor utama dalam membentuk wajah politik Indonesia yang lebih beradab dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman universal. Oleh karena itu, penting bagi studi-studi selanjutnya untuk mengembangkan analisis yang lebih kontekstual dan multidisipliner dalam melihat peran Muhammadiyah sebagai agen transformasi sosial-politik di Indonesia.

References

- Ahmad, A., & Hasan, I. (2024). Peran Tokoh Muhammadiyah dalam Konstelasi Politik Nasional di Era Reformasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 14223–14231.
- Almafariju, aisyah khoerunni'mah. (2024). Sejarah dan Peran Muhammadiyah untuk Kemajuan Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(4), 124–134. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.442>
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). Muhammadiyah dan Gerakan Perubahan: Tinjauan pada Aspek Sosial, Islam, dan Tajdid Budi. *Indonesian Research Journal on Education*, 2(3), 1030–1037.
- Bachtiar, A. (2022). Masuk Dan Berkembangnya Ide-Ide Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia Awal Abad Ke 20 Dan Pengaruhnya Dalam Bidang Sosial, Politik Dan Pendidikan. *Jurnal Dirasatuna*, 1(2), 84–97.
- Hawari, A. Y., Suwaryo, U., & Kartini, D. S. (2023). Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.181965i1.19187>
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2021). Peranan Sarekat Islam (Si) Dan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik Dan Pendidikan Pada Masa Pergerakan Nasional. *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah*, 7(2), 82. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v7i2.3669>
- Marsudi, M. S., & Zayadi, Z. (2021). Gerakan Progresif Muhammadiyah Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan Di Indonesia. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 12(2), 160–179. <https://doi.org/10.32923/maw.v12i2.2035>
- Tirtana, E., Haq, andi saiful, & Zainuddin, H. (2022). *Muhammadiyah Dan Gerakan Politik*.
- Tomadehe, S., Syukur, S., & Susmihara, S. (2023). Sejarah Islam Modern Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1606>